

UPAYA CINA-TAIWAN UNTUK BERGABUNG DALAM INTERNATIONAL SPACE STATION <ISS>: SATU KAJIAN DIPLOMASI

Totok Sudjatmiko

Peneliti Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional. LAPAN

ABSTRACT

Diplomacy is one of key factor in the international relations, specifically in the worlds politic. And in every relation between state such as China-Taiwan, diplomacy to be core competence. Intensity of China-Taiwan relation that marked with fluctuative relation which depend on Taiwan direction of foreign policy. As we know when Taiwan started talk about independen so in the same time China will be react aggressively with using capability "power" to make Taiwan think twice, in some condition China can use coercive diplomacy with military force to intimidate Taiwan. With one China policy, Taiwan only to be a rebellion province because basically Taiwan is a integral part of People Republic of China. In the same time, in the space field China has effort to reach international space cooperation through international space station (ISS) project. China want to be a 17th nation in ISS project, but there is a bigger obstacle from US, thus China try to bring Taiwan as effort to join in the world's space projects. The purpose of this essay is to explain why China as a state which have capability in space technology willing to ask Taiwan to joining in ISS.

ABSTRAK

Diplomasi adalah salah satu faktor kunci dalam hubungan internasional, khususnya di dalam politik dunia. Dalam setiap hubungan antar negara seperti Cina -Taiwan, diplomasi menjadi kompetensi inti. Intensitas dari hubungan Cina-Taiwan ditandai dengan hubungan yang berfluktuasi yang tergantung pada arah kebijakan luar negeri Taiwan. Sebagaimana diketahui ketika Taiwan memulai membicarakan mengenai kemerdekaan maka dalam waktu yang sama Cina akan bereaksi secara agresif dengan menggunakan kemampuan "*power*" untuk membuat Taiwan berpikir dua kali, di dalam beberapa kondisi Cina dapat menggunakan diplomasi pemaksa dengan kekuatan militer untuk mengintimidasi Taiwan. Dengan kebijakan satu Cina, Taiwan hanya menjadi provinsi yang memberontak karena secara mendasar Taiwan menjadi bagian yang tak terpisah dari Republik Rakyat Cina. Dalam waktu yang sama, di bidang keantariksaan Cina berupaya meraih kerjasama antariksa internasional melalui proyek stasiun antariksa internasional. Cina ingin menjadi bangsa ke 17 dalam proyek ISS, tetapi terdapat hambatan besar dari AS, kemudian Cina membawa Taiwan sebagai upaya untuk bergabung dengan proyek antariksa dunia. Tujuan dari tulisan ini untuk menjelaskan mengapa Cina sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi antariksa berkeinginan mengajak Taiwan untuk bergabung dalam ISS.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konstelasi politik internasional di kawasan Asia Pasifik diwarnai oleh beberapa dinamika salah satunya adalah dinamika hubungan antara Cina dan Taiwan. Hubungan kedua negara dapat dikatakan sebagai hubungan yang a-

simetris (Michael Rubin, 2007) atau malah dapat disebutkan sebagai pola hubungan "subordinasi" (David A. Lake, 2005). Hal ini disebabkan karena posisi Taiwan sebagai negara yang berkeinginan berdaulat tetapi di sisi lain Cina berupaya untuk tetap memaksa Taiwan menjadi salah satu bagian dari Cina. Dinamika hubungan tersebut tidak saja memunculkan aktor

Cina dan Taiwan saja tetapi juga melibatkan aktor negara *super power* di luar kawasan yaitu Amerika Serikat (AS). Pola hubungan yang terjadi antara Cina dan Taiwan kemudian tidak akan pernah terlepas dari peran AS. Upaya Cina untuk tetap berkehendak menarik Taiwan kembali ke dalam wilayah Cina dimana diakui oleh Cina bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina, hal tersebut melahirkan kebijakan yang cukup konsisten hingga sekarang yaitu *One China Policy* yang kemudian menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Cina ketika berinteraksi dengan komunitas internasional.

Upaya Cina tersebut dilakukan baik dengan tindakan yang persuasif maupun dengan tindakan-tindakan yang intimidatif dengan pengerahan kekuatan. Hal ini dilakukan dengan manuver militer dari skala kecil sampai skala besar, penggelaran militer dilakukan di dekat wilayah Taiwan. Banyak interaksi Cina-Taiwan kemudian yang menimbulkan tindakan aksi-reaksi atau *Threats and Counterthreats* di antara keduanya. Setiap upaya yang mengisyaratkan bahwa Taiwan ingin merdeka lepas dari Cina maka dengan serta merta akan direspon oleh Cina dengan bereaksi keras bahkan bila diperlukan dengan tindakan intimidasi kepada Taiwan untuk tidak berfikir melepaskan diri dari Cina.

Posisi AS dalam kaitan ini kemudian terlihat dengan tindakan Washington yang berupaya untuk menahan Cina dengan berdiri di belakang Taiwan. Walaupun Washington berada di belakang Taiwan tetapi sikap ini bukan berarti mendukung tindakan atau upaya yang mengarah kepada kemerdekaan Taiwan. Arah pembicaraan negosiasi segitiga antara Beijing-Taipeh-Washington kemudian mengarah kepada *Peaceful Resolution Diplomacy*, yaitu bahwa Taipeh dalam setiap kesempatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus mundur atau menarik diri dari posisi membicarakan mengenai kemerdekaan, maka Beijing kemudian juga akan menarik diri dari upaya atau tindakan intimidasi "ancaman". Beijing dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh PM Cina Wen

Jiabao dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Bush di kota New York mengingatkan bahwa Taiwan adalah wilayah Cina yang oleh kelompok-kelompok atau kekuatan separatis dengan menggunakan dalih demokrasi sebagai alat, berupaya untuk memisahkan diri dan lepas dari Cina (John T. Rourke, 2004). Kondisi ini dipertegas oleh Jenderal Peng Guangqian di Beijing bahwa konsekuensi dari kemerdekaan Taiwan adalah perang (John T. Rourke, 2004). Tindakan-tindakan unilateral Cina atas Taiwan adalah upaya yang ingin dicegah oleh AS, sehingga membuat Washington tidak menginginkan Taiwan untuk bergerak ke arah kemerdekaan yang akan memicu perang terbuka antara Taiwan-AS dengan Cina (John T. Rourke, 2004).

Terkait dengan kegiatan antariksa internasional, Cina berkeinginan meraih manfaat dari kerjasama di forum internasional. Cina sebagai Negara yang memiliki kemampuan dalam teknologi antariksa, dan menjadi bagian dari komunitas internasional tetap menganggap penting untuk bergabung dalam kerjasama internasional keantariksaan. Upaya Cina ini tampak pada harapannya untuk bergabung pada proyek kerjasama antariksa internasional yaitu *International Space Station (ISS)*. ISS adalah sebuah laboratorium penelitian yang berada di angkasa dan merupakan gabungan rencana stasiun luar angkasa yang terdiri dari Mir 2 Rusia, Stasiun luar angkasa *freedom* AS dan fasilitas orbital *Columbus* Eropa (Didiet, 2007). Cina melihat bahwa dengan bergabung dalam proyek ini adalah cara untuk mengesahkan klaim menjadi pemimpin dunia di bidang sains. Tetapi harapan Cina untuk bergabung bukan suatu hal yang mudah, karena keengganan sikap AS yang cenderung menolak keterlibatan Cina.

Untuk itu Cina melakukan upaya-upaya diplomasi terhadap AS. Salah satu yang dilakukan oleh Beijing adalah dengan mengikutsertakan atau mengajak Taipeh untuk bergabung pada proyek ini. Diplomasi yang dilakukan oleh Beijing di forum

2.1 Cina

Cina merupakan satu negara yang menjadi kekuatan independen karena kapabilitasnya sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi antariksa. Hal ini nampak pada upaya Cina untuk membangun teknologi misilnya yang dituangkan dalam program antariksa Cina. Pembangunan kemampuan antariksa Cina, baik untuk kepentingan militer maupun sipil dimulai dengan pembangunan wahana peluncur antariksa pada tahun 1950. Istilah *dual use* kemudian menjadi perhatian publik internasional karena di sisi lain pembangunan keantariksaan untuk kepentingan sipil, dalam pengembangannya dialihkan untuk kepentingan militer bahkan menjadi prioritas utama untuk kepentingan militer sebagai pendukung dalam eksistensi suatu negara di arena internasional.

Pengembangan kemampuan antariksa bagi Cina merupakan hal penting dan menjadi prioritas sejak Rusia masih berbentuk Uni Soviet. Karena kemudian banyak dari upaya Cina untuk pengembangan program antariksanya didukung oleh teknologi dari Uni Soviet. Dan sejak adanya transfer teknologi dari Uni Soviet inilah Cina kemudian membangun *broad-base space program* yang meliputi pembangunan roket dan beberapa variannya, sejumlah satelit, dan *telemetry, tracking, and control network*. Melalui beberapa kegagalan, Cina pada akhirnya membayar semua kegagalan tersebut dengan menjadi kekuatan yang berarti di bidang antariksa. Dan sekarang bahkan mengembangkan komersialisasi dari sektor antariksa dengan menawarkan pada publik internasional berupa jasa peluncuran dan penerbangan antariksa berawak.

Kemunculan Cina sebagai kekuatan khususnya di bidang keantariksaan secara sederhana dapat dipahami dalam beberapa periodisasi:

internasional seperti ini digunakan sebagai upaya memperkuat posisi Cina pada saat berhadapan dengan AS khususnya terkait Taiwan, di sisi lain hal ini juga sebagai upaya pelaksanaan dari tujuan utama politik luar negeri Cina yang ditujukan untuk menghalangi aktivitas-aktivitas Taiwan di internasional dan mengikis status internasional serta mengembalikan hak-hak diplomatik Taiwan ke Cina.

1.2 Permasalahan

Saat ini Cina telah memiliki kemampuan dalam teknologi antariksa. Dan Cina juga berkeinginan untuk bergabung dalam proyek ISS. Namun hingga kini AS belum memberikan tanggapan yang serius bahkan cenderung untuk menolaknya. Terkait dengan hal tersebut kemudian Cina mengajak Taiwan. Yang menjadi masalah adalah: Mengapa Cina mengikutsertakan Taiwan untuk bergabung di ISS ?

1.3 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskripsi dan data serta informasi yang ada diperoleh dari studi literatur dan internet. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan secara faktual kemampuan teknologi dan atau hubungan diplomatik yang dimiliki Cina secara induksi (dari data atau fakta yang bersifat khusus menjadi umum) untuk kemudian dapat digunakan menjelaskan mengapa Cina berkeinginan mengikutsertakan Taiwan untuk bergabung dalam ISS.

1.4 Maksud dan tujuan

Tulisan ini disusun dengan maksud memberikan suatu jawaban dalam rangka memahami keinginan Cina mengikutsertakan Taiwan untuk bergabung dalam proyek stasiun antariksa internasional yang ditinjau dari aspek diplomasi. Tujuannya adalah sebagai referensi lebih lanjut terkait dengan diplomasi yang dilakukan Cina pada kerjasama keantariksaan internasional dalam konteks ISS.

- Periode 70-an dan 80-an

Pada periode 70-an, keberhasilan Cina ditandai dengan berhasilnya peluncuran satelit pertama yang diberi nama Dong Fang Hong 1 pada 24 April 1970. Dan periode 80-an yaitu pada tahun 1984, Cina berhasil meluncurkan satelit Dong Fang Hong 2 yang merupakan satelit komunikasi eksperimen ke orbit geostationer. Pada akhir era 80-an, Cina telah membangun satelit untuk tujuan komunikasi dan meteorologi. Di tahun 1988, Cina dan Jerman barat berkolaborasi dalam proyek pembuatan satelit. Cina menggunakan wahana peluncur Chang Zheng (Long March) 1, dan mulai membangun Long March 4 di akhir 80-an yang kemudian menjadi wahana peluncur utama. Long March 1 dibangun dengan memodifikasi desain misil balistik Dong Feng. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan teknologi antariksa khususnya wahana peluncur atau roket selalu didahului dari pengembangan misil balistik yang memiliki teknologi sama, dan kemudian dikembangkan menjadi roket peluncur. Dalam perkembangan selanjutnya, Cina membuat kemajuan yang besar dengan meningkatkan *performance* wahana peluncurnya. Hal ini terlihat pada Long March 2F, yang memiliki kemampuan membawa beban maksimum 8.400 kg ke orbit rendah dan 3.500 kg ke orbit geostationer.

- Periode 90-an (Marcia S. Smith, 2003)

Era tahun 90-an merupakan suatu dekade yang revolusioner bagi program antariksa Cina. Pada era ini banyak diwarnai dengan uji coba peluncuran satelit. Dan dengan satelit-satelit uji coba tersebut Cina berupaya menempatkan satelitnya ke antariksa. Selama periode ini Cina menggunakan roket-roketnya untuk meluncurkan beberapa satelit milik Australia, AS, dan Satelit komunikasi Hong Kong, dan satelit kecil untuk sistem komunikasi sipil pimpinan AS. Cina mengakhiri dekade ini pada 21 November 1999 dengan meluncurkan *Shenzhou 1*, yang merupakan

pesawat antariksa pertama yang didesain untuk *human spaceflight*

- Periode tahun 2000 sampai sekarang (Marcia S. Smith, 2005)

Pada periode tahun 2000 sampai sekarang ini ditandai dengan peningkatan dari program antariksa Cina. Yang antara lain adalah peningkatan keandalan wahana peluncur seri Long March, sehingga angka keberhasilan peluncurannya menjadi sebanding dengan roket yang dimiliki Eropa, AS, dan Jepang. Pencapaian Cina lainnya antara lain berhasil meluncurkan pesawat antariksa berawak Shenzou 5 yang membawa *taikonaut* Yang Liwei pada tahun 2003, dan kemudian diikuti dengan diluncurkannya Shenzou 6 pada tahun 2005 yang membawa 2 orang *taikonaut*. Keberhasilan Cina meluncurkan pesawat antariksa berawak ini merupakan sejarah penting bagi Cina, dimana menjadikan Cina sebagai negara ke-3 setelah AS dan Rusia. Cina juga sedang aktif dalam berbagai proyek kerjasama internasional, seperti proyek Galileo yang dipimpin oleh Uni Eropa (EU), dan kerjasama dengan *Surrey Satellite Technology Limited*, yaitu sebuah perusahaan yang dibentuk oleh Universitas Surrey dan merupakan pemimpin dalam pengembangan satelit kecil.

2.2 Taiwan

Taiwan dari sisi kemampuan dan pemanfaatan antariksa masih tergolong sangat terbatas. Tetapi Taiwan telah memiliki badan antariksa sipil yaitu *National Space Program Office* (NSPO). Sedangkan kemampuan dan pemanfaatan untuk kepentingan militernya masih didukung penuh oleh AS. Taiwan memulai program antariksa sipilnya pada bulan oktober 1991, dengan menetapkan program badan antariksa nasional. Salah satu misi dari badan ini sebagaimana dimuat dalam program lima belas tahun mengenai keantariksaan nasional adalah mengembangkan rancang bangun sistem dan infrastruktur yang menjadi hal penting bagi Taiwan dalam membangun teknologi antariksa Taiwan sendiri di masa depan.

Tabel 2-1: PROGRAM SATELIT TAIWAN

Satelit	Tujuan	Status
Rocsat-1	Technology Testbed	Beroperasi
Rocsat-2	Remote Sensing dengan resolusi 2 m	Diluncurkan Juni 2002
Rocsat-3	Konstelasi satelit Cuaca/Iklim	Diluncurkan akhir 2002

Taiwan memiliki tiga program peluncuran satelit yang dikenal dengan ROCSAT 1, 2, dan 3 (lihat Tabel 2-1). ROCSAT 1 merupakan sukses pertama Taiwan dalam peluncuran satelit yang diluncurkan pada 26 Januari 1999 dengan roket Athena I dari Bandar antariksa Florida, AS. Disusul kemudian dengan ROCSAT 2 pada bulan Juni 2002 dan ROCSAT 3 di penghujung tahun 2002.

Meskipun Taiwan tidak memiliki program antariksa untuk militer, tetapi pihak militer Taiwan menyadari pentingnya kegunaan dari sistem militer yang didasarkan pada pemanfaatan program antariksa. Modernisasi militer Taiwan memiliki fokus pada peningkatan sistem persenjataan dengan berbasis teknologi tinggi, dan untuk itu teknologi yang diperlukan adalah berbasis kepada kemampuan teknologi antariksa. Sejalan dengan hal tersebut, dukungan AS terlihat pada penjualan sistem radar jarak jauh PAVE PAWS (*Precision Acquisition Vehicle Entry Phased-Array Warning System*), (angkasa, 2000). Sistem radar ini dapat mendeteksi misil yang diluncurkan dalam jarak 3.000 miles dan sistem radar ini dapat terhubung langsung dengan sistem anti misil yang dibangun oleh AS.

2.3 Kebijakan Amerika Serikat

Sebagai negara maju dan *super power*, AS dapat dikatakan sebagai faktor yang selalu dipertimbangkan baik di level regional maupun internasional. Demikian juga dengan kehadirannya di geopolitik Asia Pasifik. Hal ini menjadi penting khususnya dalam hubungan internasional kawasan. Karena membicarakan hubungan antara Cina-Taiwan maka tidak akan dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan luar negeri AS, khususnya dalam menjaga suhu konflik agar tetap stabil dan meredam potensi konflik yang semakin besar.

Pada era pasca Perang Dingin, peran AS atau kebijakan AS terhadap Cina dan juga Taiwan sangat kuat diwarnai dengan karakter yang mendua. Makna dari kebijakan ini adalah jika Taiwan menyatakan kemerdekaan maka hal tersebut bukan karena peran AS, demikian juga jika Cina mengerahkan kekuatan militernya untuk menginvasi Taiwan maka AS tidak terlibat didalamnya. Kebijakan AS ini adalah semata-mata untuk memperkecil *cross-strait tensions* tanpa harus menempatkan AS ditengah-tengah konflik Cina-Taiwan secara langsung. Hal ini merupakan kebijakan *dual deterrence*, yang bergantung kepada fakta bahwa Cina dan Taiwan dapat memprediksi reaksi AS untuk mengganggu kestabilan status quo, serta membuat para pembuat kebijakan AS memiliki harapan bahwa dengan kebijakan yang mendua atau bermakna ketidakpastian "*Uncertainty*" ini akan dapat menghindarkan kedua belah pihak, baik Cina (*People Republic of China*) maupun Taiwan (*Republic of China*) dari hal-hal yang mengganggu kondisi status quo. Kebijakan ini ditempuh pihak AS untuk menyeimbangkan kepentingan AS dengan kedua pihak yaitu Cina dan Taiwan, dan secara bersamaan memelihara kredibilitas, perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Dengan kemajuan Cina di bidang pengembangan teknologi, khususnya teknologi antariksa membuat AS lebih meningkatkan peran internasional untuk fokus kepada pencegahan terhadap upaya Cina dalam mengejar hegemoni. Karena dengan kemampuan militer yang dimilikinya Cina dapat melebarkan pengaruhnya, bahkan jika diperlukan dapat bertindak *Unilateral* ataupun bersama-sama Rusia atau negara-negara lain yang kemudian dapat mengancam kepentingan AS. Melihat kemampuan Cina yang secara aktif melakukan upaya peningkatan kekuatan

khususnya pembangunan persenjataan laktis antariksa yang lebih maju akan dapat menandingi era teknologi AS yang kuat.

Bagi AS, posisi Cina saat ini adalah di dalam proses menguatkan kekuatan antariksanya. Cina sudah menjadi negara yang memiliki teknologi peluncur yang canggih dan sudah mampu menyediakan jasa komersial peluncuran ke *low orbit* sampai ke *high orbit*. Melalui pembangunan atau eksploitasi teknologi antariksa, Cina akan berupaya untuk memfasilitasi revolusi dalam kemiliterannya. Cina juga mampu menggunakan teknologi antariksanya untuk meluaskan pengaruhnya di lingkaran pasifik melalui peningkatan kemampuan aplikasi kekuatan militer, dan meningkatkan prestise dan kepemimpinannya.

Tantangan bagi kebijakan AS saat ini adalah tidak terlepas dari mencari cara yang efektif untuk mengikat Cina, karena Cina memiliki tendensi lebih agresif. Terkait dengan upaya untuk memperkuat dan menstabilkan bangsa-bangsa lain di kawasan serta mendukung liberalisasi yang berjalan, maka AS berusaha untuk menahan Cina menjadi kekuatan yang agresif.

Kebijakan AS terhadap Cina dan Taiwan sangat mempertimbangkan perubahan peran teknologi antariksa di kawasan. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang banyak menyimpan potensi konflik yang akan melibatkan negara-negara yang pantas dipertimbangkan, karena negara-negara tersebut memiliki akses dalam memajukan teknologi antariksanya, baik melalui pembangunan sendiri maupun didapat dari cara-cara komersial. Kemajuan teknologi antariksa dapat menjadi kunci lain yang mengubah situasi keamanan di lingkaran Asia Pasifik melalui dua cara (Rebecca Jimerson, 2000), *pertama*: dengan kemampuan mengakses kemajuan teknologi militer dari misil balistik hingga radar militer, akan membuat semakin banyak negara yang akan mampu meningkatkan kemampuan *command and control*. Dengan proliferasi teknologi militer maka akan mampu membuat kawasan

tidak terlepas dari gejolak; *kedua*: teknologi satelit secara dramatis mengalami kemajuan yang membuat kawasan Asia Pasifik lebih transparan, seperti akses *remote sensing* secara komersial, pembangunan kemampuan sendiri teknologi satelit, dan peningkatan distribusi informasi semakin mudah bagi negara-negara sehingga masing-masing negara akan dapat saling memonitor status dan posisi satu sama lain.

Perhatian AS mengarah kepada dua hal penting yaitu di satu sisi pada pertumbuhan keantariksaan dan kekuatan militer Cina, dan sekaligus mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh regional atas kemajuan teknologi Cina. Dan di sisi lain adanya tantangan untuk menjadikan Taiwan sebagai kekuatan ekonomi global dan memiliki kemampuan militer yang signifikan serta demokratis. Amerika Serikat juga mempertimbangkan bahwa setelah era Perang Dingin, dengan kemajuan bidang teknologi akan dapat mengubah hal yang bemuansa ambigu menjadi lebih transparan. Teknologi baru yang didasarkan pada teknologi antariksa, teknologi informasi, dan sistem *dual use* akan berperan sebagai katalisator bagi perubahan yang cepat dan sulit diprediksi di geopolitik Asia. AS harus mengejar kebijakan internasionalnya yang mengizinkan pembangunan teknologi baru yang tidak merusak keamanan baik di Asia maupun seluruh dunia.

3 *INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS)*

3.1 **Pembangunan ISS**

ISS merupakan suatu stasiun antariksa yang menjadi fasilitas penelitian terbesar yang ditempatkan di antariksa. Pada tahun 1984 Presiden AS Ronald Reagan mengajukan suatu kerjasama dengan negara-negara untuk membangun stasiun antariksa. Upaya kerjasama ini melibatkan 14 negara, yaitu Kanada, Jepang, Brazil, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Italia, Belanda, Denmark, Norwegia, Spanyol, Switzerland, Swedia, dan *European Space agency*. Dan selama perencanaan pembangunannya, pada tahun 1993 AS mengajak Rusia untuk bergabung yang

menjadikan jumlah negara yang berpartisipasi dalam ISS menjadi 16. Sedangkan untuk koordinasi konstruksi ISS dipirapin oleh NASA.

Untuk pembangunan di Orbit di mulai pada tahun 1998. Stasiun antariksa ini berada di orbit rendah dengan ketinggian sekitar 350 km di atas permukaan bumi dan bergerak dengan kecepatan rata-rata 27,700 km per jam, meliputi 15.77 orbit per hari. Sedangkan untuk *space agencies* yang tergabung dalam proyek ISS ini meliputi : AS (NASA), Russia (RKA), Jepang (JAXA), Kanada (CSA), Eropa (ESAJ, dan Brazil (BSA).

3.2 Upaya Cina Terkait dengan ISS

Terkait dengan upaya Cina, dapat dilihat dari pernyataan wakil menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Cina Li Xueyong yang mengatakan "*China sincerely wants to cooperate with the United States in space exploration and join the International Space Station project that has already involved 16 nations.*" Hal ini menunjukkan adanya harapan Cina untuk menjadi negara ke 17 dalam proyek ISS.

Namun, keinginan partisipasi Cina dalam ISS tidak ditanggapi secara serius oleh AS. AS beralasan, bahwa teknologi Cina belum matang dibandingkan dengan teknologi yang dimiliki negara-negara mitra ISS. Namun, alasan yang sebenarnya sikap tidak kooperatif Washington dalam menanggapi keinginan Cina untuk berpartisipasi dalam ISS adalah karena kecurigaannya terhadap upaya keantariwaan Cina yang pada akhirnya akan digunakan untuk tujuan militer, dimana hal ini merupakan ancaman bagi AS. Militer AS dan sejumlah otoritas pengambil keputusan dari AS masih menolaknya karena menilai bahwa program antariksa Cina berpotensi membahayakan. Sebagaimana diketahui pada awal tahun 2007, Cina mendapat kritikan tajam dari seluruh dunia karena melakukan percobaan misil untuk menghancurkan sebuah satelit cuaca sebagai bagian uji coba senjata. AS menilai bahwa program pesawat antariksa berawak Cina dan peluncuran Shenzou yang membawa

taikonaut dapat digunakan sebagai *platform* pengintaian. Dengan demikian, ketika Cina berpartisipasi dalam ISS maka Cina akan terlibat dalam berbagi informasi dan teknologi, sehingga akan menimbulkan resiko penyebaran informasi teknologi militer ke Cina (Victor Zaboraky, 2004).

4 ANALISA

4.1 Diplomai Secara Uinum

Definisi umum dari diplomasi menurut Vandana adalah "*Diplomacy is the management of international relation by means of negotiaton*" (Vandana, 1996) yaitu suatu manajemen hubungan internasional melalui negosiasi. Menurut G.R. Berridge, *diplomacy is an essentially political activity and, well resourced and skillful, a major ingredient of power* (G. R. Berridge, 2005). Sedangkan menurut kamus hubungan internasional definisi diplomasi dalam artian yang sempit dan terbatas dimaknakan sebagai sarana dan mekanisme sementara politik luar negeri, menetapkan tujuan atau sasaran dan mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi (Kamus Hubungan Internasional, edisi ketiga). Dan diplomasi merupakan salah satu instrumen prioritas dalam kebijakan luar negeri dan kebijakan luar negeri sangat mewarnai dinamika politik internasional. Dalam pandangan tradisional diplomasi dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu kepentingan nasional yang didukung oleh kekuatan yang oleh kaum realis dimaknakan dengan "*power*". Oleh sebab itu kemudian diplomasi memiliki celah untuk menggunakan kekuatan pemaksa "*coercive*" untuk meraih suatu kesepakatan yang dikehendaki, dan dalam level politik internasional diplomasi diperlukan manakala ketidaksepakatan tersebut muncul.

Sedangkan untuk tujuan dari diplomasi itu sendiri dijelaskan oleh Palmer dan Perkins (Palmer and Perkins, 1976), "*The Objectives of diplomacy is to protect the security of nation, by peaceful means if possible, but by giving every assistance to military operations if war*

cannot be avoided". Dilihat dari tujuan diplomasi tersebut maka makna yang dapat diambil adalah adanya upaya untuk melindungi keamanan nasional dengan menggunakan cara-cara damai jika hal itu dimungkinkan, tetapi yang perlu dipahami dari tujuan diplomasi ini adalah bahwa tidak menutup kemungkinan untuk mengerahkan bantuan berupa operasi militer jika suatu perang tidak dapat dihindari. Secara singkat kemudian dapat dikatakan bahwa perang merupakan suatu bentuk diplomasi terakhir.

Dilihat dari perjalanan diplomasi pada tataran internasional tidak akan terlepas dari dinamika internasional yang terjadi. Pada konteks Perang Dingin perjalanan diplomasi sangat diwarnai oleh konflik ideologi blok Barat dan Timur dimana akan berpengaruh pada cara, prosedur dan substansi diplomasi. Nuansa diplomasi personal dalam perang dingin sangat terasa karena besarnya tugas dan kekuasaan seorang duta besar dalam mengambil keputusan. Akan tetapi kemudian pada era pasca Perang Dingin khususnya pada era globalisasi kondisi ini mengalami perubahan, dimana peran teknologi informasi semakin menjadi prioritas penting. Dengan revolusi teknologi informasi ini akan membawa suatu konsekuensi penting dalam hubungan internasional, dimana konsep baru pun kemudian mewarnai dinamika hubungan internasional dewasa ini. Konsep baru tersebut menuntut adanya penjelasan kepada masyarakat, selain munculnya masalah-masalah yang semakin kompleks sifatnya (R.P Barston, 1988). Peran diplomasi saat ini semakin menuntut peningkatan dari diplomasi personal yang dilakukan antara dua kepala pemerintahan atau G to G, seiring dengan semakin banyak munculnya aktor diplomasi maka intensitas diplomasi multilateral juga semakin meninggi yang memerlukan dukungan ahli-ahli tertentu terutama dalam membahas bidang-bidang khusus. Diplomasi multilateral yang berlaku dewasa ini banyak menitikberatkan kepada aktivitas diplomasi pada bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Sedangkan diplomasi

bilateral membawa bentuk-bentuk hubungan baru di antara aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah yang dikarenakan semakin meluasnya agenda-agenda diplomatik dan kebijakan luar negeri.

4.2 Hubungan Cina-Taiwan

Aspek diplomasi telah mewarnai hubungan antara Cina dan Taiwan sejak kekalahan kaum nasionalis, untuk melihat sekilas perjalanan hubungan Cina Taiwan dapat dilihat dari kronologi sebagai berikut:

- Pada tahun 1949, Pemimpin Nasionalis Chiang Kai shek mengalami kekalahan dalam perang saudara dengan pimpinan komunis Mao Zedong yang memaksanya mendirikan pemerintahan Taiwan di pengasingan,
- Pada tahun 1958, Cina melakukan upaya bombardir di lepas pantai pulau yang dikuasai oleh pasukan kaum nasionalis, dan hal ini hampir menyulut peperangan terbuka antara Cina dan AS,
- Pada tahun 1971, Taiwan kehilangan posisi sebagai Republik Cina di PBB sejak 1946, menjadi Republik Rakyat Cina,
- Pada tahun 1987, Setelah saia dasa warsa dari masa konflik, Taiwan dan Cina meningkatkan pendekatan dengan kehati-hatian, dengan mengizinkan kunjungan dari kemarga-keluarga di seberang Selat,
- Pada tahun 1991, Taiwan mulai meninggalkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk kembali ke daratan Cina, dan mulai menempuh cara-cara melalui pembicaraan tidak resmi,
- Pada tahun 1993, dilakukanlah pertemuan bilateral di Singapura,
- Pada Januari 1995, Presiden Cina Jiang Zemin meminta pembicaraan pada tingkat tinggi untuk mengakhiri status permusuhan Cina-Taiwan. Tetapi Taiwan menolak penawaran tersebut,
- Pada Juni 1995, Presiden Taiwan Lee Teng Hui melakukan perjalanan pribadi ke AS yang menimbulkan kemarahan pihak Beijing,
- Pada Maret 1996, Cina melakukan uji proyektil api di perairan dekat timur laut kepulauan dan bagian barat daya Taiwan

- pada saat dilakukan pemilihan presiden secara demokratis. Dan Lee memenangkan pemilihan dengan suara terbanyak,
- Pada tahun 1998, Taiwan mengirimkan dutanya Koo Chen Fu untuk bertemu dengan Jiang di Cina pada kontak tingkat tinggi setelah hampir lima dekade,
 - Pada tahun 1999, Lee Teng Hui secara unilateral mendefinisikan ulang ikatan bilateral sebagai "*special state to state*". Dan Beijing membekukan pembicaraan *semi-official*,
 - Pada Januari 2001, Taiwan membuka langsung jalur perjalanan dan perdagangan terbatas dengan Cina,
 - Pada tahun 2003, Taiwan melakukan penerbangan komersial pertama setelah lebih dari 50 tahun dengan mendarat di Shanghai, Cina, tetapi harus terlebih dahulu melalui Hongkong,
 - Pada Maret 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Cina melalui Undang-Undang anti-pemisahan memberikan wewenang kepada Pemerintah Cina untuk menggunakan kekuatan jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan,
 - Pada tahun 2007, Taiwan melarang untuk merelai olimpiade Beijing 2008, setelah pembicaraan berbulan-bulan dengan Cina menemui kegagalan.

Dari kronologi tersebut di atas dapat dilihat bahwa intensitas pembicaraan didasarkan kepada keinginan Taiwan yang tetap ingin membicarakan kemerdekaan dan di sisi lain hal ini menimbulkan reaksi keras dari pihak Cina. Sebagaimana tampak pada periode 1995-1996, Cina telah menerapkan diplomasi memaksa "*coercive diplomacy*". Hal ini disebabkan karena hilangnya kesabaran dari pihak Cina dalam membujuk Lee Teng Hui, yang kemudian membuat Cina mengadopsi pendekatan "paksa" untuk memecahkan tsu yang ada. Pengerahan kekuatan pada era 1995-1996 ini merupakan manifestasi dari model diplomasi pemaksa Cina yang ditujukan untuk menekan Taiwan.

Pembicaraan terkait dengan reunifikasi dimulai oleh Cina pada era tahun 1960an, ketika ketua Partai Komunis Cina

(PKC) Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai mengajukan sebuah proposal rencana kepada Taiwan untuk bernegosiasi, yaitu *yi gang si mu 'one principle and four points'*. Dalam prinsip tersebut jelas menyebutkan bahwa Taiwan akan kembali ke pangkuan Cina, sedangkan bagi Cina sendiri menyampaikan empat prinsip yang melipuu" (Richard Pereira, 2001):

- Mengembalikan hak diplomatik ke Cina,
- Menyediakan dukungan pendanaan bagi Taiwan,
- Menunda reformasi bergaya sosialis di Taiwan,
- Menahan diri dari melibatkan perilaku merusak bagi pihak lain.

Hal yang mendasari proposal tersebut adalah adanya keinginan dari Cina dengan kebijakan luar negerinya yang kemudian dikenal dengan "*one country, two systems*". Kebijakan ini muncul kemudian pada era 1980an yang merupakan hasil dari pemikiran Deng Xioping.

Kemudian terjadi pencapaian konsensus dari kedua pihak pada tahun 1992, dimana kedua pihak akan tenwakilkan pada organisasi non pemerintah/NGO, konsensus tersebut merupakan konsensus terhadap "*one China*". Dan setahun kemudian terjadi pertemuan yang diadakan di Singapura antara dua juru runding ke dua pihak Mr. Wang Daohan, ketua dari *Beijing's Association for Relations Across the Taiwan Strait* (ARATS) dan Mr. Koo Chen-fiu, ketua dari *Taipei's Straits Exchange Foundation* (SEF). Dari pertemuan ini kemudian menghasilkan prinsip "*one China*" yang menjadi inti konsensus. Pada pertemuan tingkat tinggi ini masing-masing pihak menunjukkan posisinya, yaitu Beijing tetap menginginkan pihak Taiwan untuk tetap pada posisi *one China* dan tetap pada koridor unifikasi nasional. Sedangkan dari pihak Taiwan adalah di dalam proses menuju unifikasi nasional, dimana kedua pihak dengan mengacu kepada prinsip *one China* untuk lebih dapat mendefinisikan *one Cina*, yang dari kedua pihak masih memiliki beberapa pandangan yang berbeda.

Prinsip yang dianut dalam kebijakan luar negeri Cina adalah hanya ada satu Cina di dunia, dan Taiwan adalah provinsi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah teritorialnya. Semua negara yang ingin membangun hubungan dengan Cina harus bersedia untuk memutus semua bentuk hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui bahwa pemerintah Cina adalah sebagai pemerintahan yang sah. Untuk itu pemerintah Cina tidak akan bisa menerima upaya apapun dari negara-negara yang hendak membentuk "dua Cina" atau "satu Cina, satu Taiwan", atau juga tidak akan memaklumi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Cina untuk membangun bentuk-bentuk hubungan dengan otoritas Taiwan.

Diplomasi sebagai wujud dari politik luar negeri merupakan formulasi kepentingan dalam negeri suatu negara. Demikian juga dengan politik luar negeri Cina, dimana kepentingan Cina terhadap Taiwan adalah hal krusial dan menjadi kebijakan prioritas sehingga intervensi terhadap Taiwan dari negara lain dalam berbagai bentuk merupakan intervensi dalam urusan domestik Cina. Untuk itu yang menjadi tujuan utama politik luar negeri Cina adalah bagaimana mengikis atau menghapus status internasional dan menutup segala bentuk aktivitas internasional Taiwan.

4.3 Penerapan Diplomasi oleh Cina dalam Konteks ISS

Dalam penerapan diplomasi sebagaimana diketahui bahwa dalam diplomasi dalam arti yang sempit dan tradisional adalah terkait dengan metode/cara dan mekanismenya sedangkan politik luar negeri merupakan tujuan dan maksud dari kepentingan negara. Oleh sebab itu pada konteks penerapan diplomasi oleh Cina juga tidak terlepas dari tujuan dan maksud politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri Cina memiliki dua target yaitu domestik dan internasional (David Shambaugh, 2005). Untuk tujuan domestik, Partai Komunis Cina (PKC) sebagai pemegang kekuasaan adalah pencapaian yang tinggi dari program antariksa yang menjadi

kebanggaan Cina sebagai alat sumber pemersatu dan sekaligus meningkatkan citra dari PKC. Sedangkan untuk tujuan internasionalnya adalah untuk mengurangi kecemasan dari komunitas internasional terhadap program antariksa Cina yang dipandang sebagai upaya untuk meraih peran dominannya. Untuk itu, maka Beijing kemudian menerapkan suatu diplomasi dengan penuh kehati-hatian, seperti pada tahun 2002, Beijing bersama dengan Moscow mengajukan *working paper* ke konferensi perlucutan senjata PBB yang melarang persenjataan di antariksa.

Dengan mengembangkan kemampuan antariksanya sendiri dan secara bersamaan ikut dalam upaya membatasi persenjataan di antariksa, Cina mendapatkan dua hal, pertama adalah militernya dipercaya dan dari sisi diplomasi Cina secara persuasif dapat bergabung dengan komunitas internasional sebagai penjaga perdamaian dan mempertahankan zona bebas senjata di antariksa. Kemudian *white paper* keantariksaan Cina juga memberikan penegasan kepada *The United Nations of Outer Space Affairs* (UNOOSA) bahwa Cina bukanlah persepsi ancaman bagi internasional. Hal ini membawa dampak secara signifikan, sehingga pada tahun 1990 program antariksa Cina dipindahkan dari sebelumnya di bawah kontrol administratif Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menjadi di bawah badan baru yaitu *the China National Space Agency* (CNSA). Tugas diplomatik Beijing dalam meredakan persepsi ancaman Cina adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan, dan program antariksa dapat berfungsi sebagai jendela bagi partisipasi baru Cina di tingkat internasional. Dan dalam rangka memenuhi keamanan nasional dan penggunaan antariksa untuk kepentingan sipil domestik, kegiatan antariksa Cina digunakan sebagai media diplomasi.

Saat ini di antara sekian banyak program antariksa internasional yang ada, salah satunya adalah *International Space Station [ISS]*. Kepentingan Cina di dalam kegiatan antariksa internasional tidak terlepas pula dari upaya mengusung

kebijakan *One China*. Dalam kaitan ini, maka Cina berupaya melibatkan Taiwan untuk memperoleh akses di dalam kegiatan antariksa internasional, sebagai salah satu langkah Cina dalam menerapkan kebijakan satu Cina.

Untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu mengapa Cina mengikutsertakan Taiwan pada ISS adalah dengan melihat diplomasi yang dilakukan oleh Cina sebagai wujud dari kebijakan luar negerinya. Dalam kebijakan luar negeri Cina pada permasalahan ini memiliki dua makna, pertama adalah terkait dengan peran serta kegiatan antariksa internasional dan kedua adalah terkait kebijakan satu Cina.

Kebijakan luar negeri Cina sangat tegas menunjukkan posisi Cina atas Taiwan. Hal ini dapat dilihat pada empat prinsip kebijakan luar negeri. Di mana keikutsertaan Cina dalam organisasi, baik regional maupun internasional merupakan satu langkah diplomasi Cina selain untuk memperkuat perekonomiannya juga untuk membangun citra internasional. Citra internasional dimaksud adalah sebagai negara yang mendukung perdamaian dan mengeliminir persepsi ancaman yang melekat pada Cina. Namun demikian upaya Cina itu dapat dipahami juga dari eisi yang lain yaitu untuk memutus hak diplomatik Taiwan dengan komunitas internasional.

Pada konteks ISS, keinginan Cina untuk dapat ikut serta di dalamnya sangat kuat walaupun mendapat hambatan dan tantangan dari penggagasnya AS. Walaupun mendapat hambatan dari AS, Cina tetap berupaya untuk mencari akses diplomasi agar dapat bergabung pada proyek ini. Salah satu akses diplomasi yang diambil oleh Cina adalah dengan mengikutsertakan Taiwan dalam satu kesatuan kehendak dari Beijing untuk bergabung dengan ISS. Dengan mengikutsertakan Taiwan dalam proyek ISS merupakan salah satu cara bagi Cina untuk menunjukkan bahwa sebagai bagian dari anggota komunitas internasional, Cina memiliki kebijakan luar negeri yang *constructive*. Dan hal tersebut juga sesuai dengan kerangka *Shanghai Communique [1972]*, dimana kerangka ini

akan menjadi sebuah simbol perdamaian antara pemerintah Beijing dan Taipei khususnya dalam rangka menyelesaikan perbedaan mereka secara damai.

Komunike ini ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 1972 oleh Cina dan AS. Di dalam komunike ini muncul suatu pengakuan oleh AS terhadap status Taiwan, dimana AS hanya akan mengakui kebyakan satu Cina dan Taiwan adalah bagian dari Cina. Terkait dengan Komunike Shanghai ini akan terdapat dua implikasi penting bagi Cina dan Taiwan, yaitu *pertama*: bila ke dua pihak memiliki kesepahaman dan sepakat untuk bergabung dalam proyek ISS maka kedua negara akan memperoleh keuntungan berupa kesempatan yang dimulai dengan mengikutsertakan *taikonauts* dari kedua negara dalam misi pesawat ulang alik yang kemungkinan membawa *Alpha Magnetic Spectrometer (AMS)* ke ISS. AMS yang memuat bagian-bagian yang dibuat Cina dan Taiwan ini kemudian akan beroperasi dengan ditempatkan pada ISS; *kedua*: karena adanya hambatan dari AS, maka Cina berupaya dalam diplomasinya Untuk kembali pada komunike ini, bahwa Cina bukanlah suatu persepsi ancaman bagi internasional dan AS pun sudah mengakui kebijakan satu Cina. Kedua implikasi tersebut dapat menjadi *bargaining position* Cina kepada AS untuk dapat diterima bergabung dalam proyek ISS.

5 KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

- * China berkeinginan untuk bergabung menjadi negara yang ke-17 dalam proyek ISS. Tetapi sampai saat ini AS masih belum menanggapi secara serius keinginan Cina ini, bahkan cenderung untuk menolaknya,
- * Sikap AS ini disebabkan karena adanya kekhawatiran akan program keantariksaan Cina yang akan digunakan untuk kepentingan militer dan akan mengancam keberadaan AS,
- * Dengan mengajak Taiwan untuk bergabung dalam proyek ISS ini merupakan diplomasi

Cina untuk mengingalkan dan menunjukkan bahwa (i) Cina dan AS telah menandatangani Komunike Shanghai dimana AS hanya mengakui satu Cina (ii) bahwa Cina sebagai bagian dari komunilas intemasional memiUh diplomasi damai yang mencoba mengeliminir kesan bahwa teknologi antariksa Cina sebagai ancaman, dan (iii) kebijakan luar negeri Cina lebih bersifat pragmatis sejalan dengan pemikiran yang dicetuskan oleh Deng Xioping dengan melihat pada kondisi terkini dimana kepentingan nasional Cina menjadi prioritas utama di atas yang lain,

- Dengan bergabungnya dalam proyek ISS, Cina dan Taiwan akan mendapat kesempatan untuk masuk satu kelompok dengan negara-negara *space faring* yang lain, serta menguatkan klaim menjadi pemimpin dunia di bidang sains.

DAFTAR RUJUKAN

- Angkasa, 2000. *Radar Peringatan Dini Jarak Jauh, AN/FPS-115 Pave Paws (Precision Acquisition Vehicle Entry Phased-Array Warning System)*, <http://www.angkasa-online.com/>. down load tgl 04/08/07. Jam 10.00 wib.
- Barston. **R.P., 1988.** *Modern Diplomacy.* Longman, New York.
- Berridge, G.R., 2005. *Diplomacy Theory and Practice*, Third Edition. Palgrave Macmillan. H. New York.
- David A. Lake, 2005. *Hierarchy in Intemational Relations: Au thority. Sovereignty, and the New Structure of World Politics.*
- David Shambaugh, 2005. *China's New Diplomacy in Asis A Proactive PRC is Transforming International Relations Throughout Asia.*
<http://todayinspacehistory.wordpress.com/2007/4/>. down load tgl 18/08/07. Jam 14.00 wib.
http://www.chinadaily.com.cn/en/doc/20-03-09/30/content_268944.htm. down load tgl 25/05/07. Jam 13.00.wib.
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2007/10/will-china-boar.html. down load tgl 08/05/07. Jam 15.25. wib.
- <http://www.geocities.com/CapeCanaveral/1aunchpad/1921/news-2.htm> Chinese Space News (April 1998). down load tgl 20/07/07. Jam 10.30. wib.
- <http://www.scrippsnews.com/> 2007. down load tgl 25/09/07. Jam 14.00. **wib.**
- Husaini Usman, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- LTC Richard Pereira, *China-Taiwan Polemics: How the Die Was Cast Against Durable Peace*, http://www.mindef.gov.sg/safty/journals/2001/Vol27_4/2.htm. down load tgl 15/08/07. Jam 13.45 wib.
- Maria S. Smith, 2003. *China's Space Program: An Overview.*
- Maria S. Smith, 2005. *China's Space Program: An Overview.*
Mengintip-iss-international-space-station,
<http://wordpress.com/2007/11/27/>, down load tgl 07/10/07. Jam 11.30. wib.
- Michael Rubin, 2007. *Asymmetrical Threat Concept and its Reflections on International Security.*
- National Space Program Office Website, 2000.
Shanghai Communique, <http://www.taiwandocuments.org/communique01.htm>./1972. down load tgl 21/08/07. Jam 11.30 wib.
- Sheng Lijun, March 1999. *China Eyes Taiwan: Why is a Breakthrough so Difficult*", The Journal of Strategic Studies, Vol. 21, No. 1.
- Staf Writer Beijing China, 2007. *China Hopes To Join International Space Station Project*, <http://www.space-travel.com/reports/> down load tgl 01/08/07. Jam 13.30 wib.
- Sumaryo Suryokusumo, 2004. *Praktik Diplomasi*, Jakarta.
- Transformasi dalam studi Hubungan Intemasional, 2007. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Vandana, 1996. *Theory of International Politics*, Vikas Publishing, New Delhi.
- Victor Zaborisky, 2004. *Does China Belong in the Missile Technology Control Regime?.*